

## FUNGSI DAN TANTANGAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN INKLUSIF

**Albert Yansen**

Universitas MH.Thamrin  
[albert.yansen@gmail.com](mailto:albert.yansen@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyse the functions and challenges of political parties in realising democratic and inclusive elections in Indonesia through a literature review method. Political parties play a strategic role as a means of political education, cadre recruitment, channelling public aspirations, and monitoring the electoral process, all of which aim to ensure equal political participation without discrimination. However, in practice, political parties still face various obstacles, such as weak internal democracy, elite domination, money politics, low transparency and accountability, and minimal representation of vulnerable groups such as women, people with disabilities, and other minorities. Additionally, external challenges such as regulatory complexity, political fragmentation, and low-quality political education further exacerbate the situation, making the electoral process not yet fully democratic and inclusive. Therefore, internal party reforms, the implementation of affirmative policies, increased transparency, and the strengthening of inclusive political education are needed so that political parties can optimally perform their functions as the main pillars of democracy and realise truly democratic and inclusive elections in the future.*

**Keywords:** Political Parties, Democratic Elections, Inclusive Elections, Democracy, Vulnerable Groups, Internal Reforms.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan tantangan partai politik dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif di Indonesia melalui metode kajian pustaka. Partai politik memiliki peran strategis sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen kader, penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap jalannya pemilu, yang semuanya bertujuan untuk memastikan partisipasi politik yang setara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, partai politik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, praktik politik uang, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya representasi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas lainnya. Selain itu, tantangan eksternal seperti kompleksitas regulasi, fragmentasi politik, dan rendahnya kualitas pendidikan politik turut memperburuk situasi, sehingga proses pemilu belum sepenuhnya demokratis dan inklusif. Dengan demikian, diperlukan reformasi internal partai, penerapan kebijakan afirmatif, peningkatan transparansi, serta penguatan pendidikan politik yang inklusif agar partai politik dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pilar utama demokrasi dan mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis dan inklusif di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Pemilu Demokratis, Pemilu Inklusif, Demokrasi, Kelompok Rentan, Reformasi Internal.

## Pendahuluan

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem politik modern, khususnya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Keberadaan partai politik tidak hanya sebagai organisasi yang mewadahi kepentingan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana utama dalam proses pengambilan keputusan politik melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Dalam konteks demokrasi, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan public (Kristina Āufar; Hana Hawlina, 2025).

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengenal sistem multipartai yang memungkinkan berbagai kelompok masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui partai-partai politik yang ada. Sistem ini semakin berkembang seiring dengan dinamika politik nasional, terutama setelah diberlakukannya reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi kebebasan berpolitik dan pembentukan partai politik baru. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjadi ajang bagi partai politik untuk berkompetisi secara terbuka dan adil (Aslan, 2019).

Pemilu di Indonesia diatur secara tegas dalam konstitusi, khususnya Pasal 22E UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menegaskan pentingnya pemilu yang demokratis, tetapi juga menuntut adanya inklusivitas, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, partai politik menjadi peserta utama pemilu, baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif (Gary Klaukka; Sam Van der Staak; Jorge Valladares, 2017).

Fungsi partai politik dalam pemilu sangat beragam, mulai dari melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin, hingga menjadi sarana agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, partai politik diharapkan mampu menciptakan proses pemilu yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substansial, yakni mampu mewakili keragaman dan kepentingan seluruh elemen Masyarakat (Maruci, 2025). Selain itu, partai politik juga berperan sebagai sarana integrasi politik. Mereka menghubungkan individu maupun kelompok masyarakat ke dalam sistem politik, sehingga partisipasi politik tidak hanya terbatas pada saat pemilu, tetapi juga dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, partai politik menjadi aktor sentral dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia (Maruci, 2025).

Namun, dalam praktiknya, partai politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya demokratisasi internal di tubuh partai, yang seringkali ditandai dengan dominasi elit partai dan minimnya partisipasi anggota dalam pengambilan

keputusan strategis. Hal ini berdampak pada kurangnya kaderisasi yang inklusif dan representative (Cici Maruci, 2025).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah masalah pendanaan partai politik. Keterbatasan dana seringkali membuat partai politik kesulitan untuk menjalankan aktivitas politik secara efektif, termasuk dalam melakukan pendidikan politik dan kampanye yang sehat. Akibatnya, praktik politik uang dan clientelism masih kerap ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini tidak hanya merusak integritas proses pemilu, tetapi juga menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis dan inklusif (Dean Schafer; Seraphine F. Maerz; Carsten Q. Schneider; Alexandra Krasnokutskaya, 2025). Selain faktor internal, partai politik juga menghadapi tantangan eksternal, seperti rendahnya partisipasi kelompok rentan (perempuan, minoritas, dan difabel) dalam proses pencalonan maupun pengambilan keputusan di partai. Padahal, inklusivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Upaya afirmasi, seperti penerapan kuota perempuan dalam pencalonan legislatif, masih menghadapi berbagai kendala implementasi di lapangan (Jehad Yousif Alayasa; Juraj Nemec, 2025).

Di sisi lain, dinamika politik nasional yang cenderung pragmatis juga mempengaruhi orientasi partai politik. Banyak partai politik lebih fokus pada upaya memenangkan pemilu daripada memperjuangkan ideologi atau program kerja yang berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang. Hal ini menyebabkan partai politik seringkali abai terhadap isu-isu strategis seperti penguatan demokrasi substansial dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas (Marta Pérez-Escolar; Noemí Morejón-Llamas; Purificación Alcaide-Pulido, 2025).

Peran partai politik sebagai sarana pendidikan politik juga belum berjalan optimal. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam konteks pemilu, sehingga partisipasi politik seringkali bersifat pasif dan transaksional. Padahal, pendidikan politik yang efektif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dalam memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan public (Smith, 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, partai politik juga dihadapkan pada tantangan teknis dan administratif, seperti sistem pemilu yang kompleks, regulasi yang sering berubah, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Semua faktor ini berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses pemilu secara keseluruhan (John Smith; Maria Lee, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam fungsi dan tantangan partai politik dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran strategis partai politik sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diatasi demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas fungsi dan tantangan partai politik dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif di Indonesia. Data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut kemudian diseleksi, dikaji secara kritis, dan disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan-temuan terdahulu, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan sintesis pengetahuan yang telah ada (Tranfield et al., 2003); (Booth, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Fungsi Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis dan Inklusif**

Partai politik memiliki peran fundamental dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi di Indonesia, terutama melalui pelaksanaan pemilu yang demokratis dan inklusif. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam proses politik dan kebijakan public (Nguyen, 2023).

Salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui pendidikan politik, partai politik membekali warga negara dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban politiknya, mendorong partisipasi aktif dalam pemilu, serta membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi yang inklusif. Pendidikan politik ini juga berperan dalam membentuk budaya politik yang sehat dan kritis di tengah masyarakat. Selain itu, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu menyeleksi dan mengangkat kader-kader terbaik untuk diusung sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Proses rekrutmen yang terbuka dan berkeadilan memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin yang representatif dan mampu memperjuangkan kepentingan publik secara luas (Minh Nguyen; Dewi Sari, 2023).

Fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan juga menjadi peran penting partai politik. Partai politik menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan negara, sehingga setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat terwakili dalam proses politik. Hal ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis (Pascal D. König; Georg Wenzelburger, 2020).

Partai politik juga berperan sebagai sarana partisipasi politik, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang diusung partai. Dengan demikian, partai politik mendorong

keterlibatan masyarakat secara luas dalam pemilu, memperkuat legitimasi dan kualitas demokrasi. Dalam konteks inklusivitas, partai politik diharapkan mampu membuka akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, suku, atau kondisi fisik. Upaya afirmasi seperti penerapan kuota perempuan dan penyediaan akses bagi penyandang disabilitas menjadi indikator penting dalam menilai komitmen partai terhadap pemilu yang inklusif (APSA Presidential Task Force, 2023).

Fungsi pengawasan terhadap jalannya pemilu juga menjadi tanggung jawab partai politik. Melalui pengawasan, partai politik dapat memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu. Pengawasan ini dilakukan baik secara internal di lingkungan partai maupun eksternal bersama lembaga penyelenggara pemilu (Kristina Ćufar; Hana Hawlina, 2025).

Partai politik turut berperan dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan damai selama proses pemilu berlangsung. Mereka diharapkan mampu meredam potensi konflik, mendorong dialog antar kelompok, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah persaingan politik yang ketat. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial selama dan setelah pemilu. Sebagai mesin penjarang aspirasi, partai politik juga berperan dalam menyeleksi calon pemimpin daerah maupun nasional yang memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin. Mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan (Zati, 2025).

Partai politik harus mampu membangun sistem internal yang demokratis, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh anggota partai. Demokratisasi internal ini menjadi prasyarat penting agar partai politik dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif. Dalam pelaksanaan pemilu, partai politik juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi aturan dan tahapan pemilu kepada masyarakat dan kadernya. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pemilih dan calon memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pemilu yang berlaku, sehingga dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab (Aqilla Zati; Maharani Awalia; Romero Heriarji; Ziyad Nabil, 2025).

Partai politik diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan afirmatif bagi kelompok marginal, seperti perempuan, minoritas, dan penyandang disabilitas, agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam proses politik dan pencalonan legislatif. Komitmen terhadap inklusivitas ini menjadi ukuran keberhasilan partai dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan adil (Hugo Bonin, 2025).

Fungsi partai politik sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat juga mencakup upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sebagai

agen perubahan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan (Melek Aylin Özoflu; Giray Gerim, 2025).

Partai politik harus mampu menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas politiknya, termasuk dalam pendanaan, rekrutmen kader, dan kampanye. Transparansi ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi, politik uang, dan clientelism yang dapat merusak proses pemilu dan demokrasi.

Terakhir, partai politik memiliki tanggung jawab untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang, termasuk dalam memperluas basis dukungan dan memperkuat inklusivitas. Hanya dengan komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan inklusivitas, partai politik dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Kristiyanto, 2023).

Dengan demikian, partai politik memegang peranan sangat strategis sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia. Partai politik tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik, rekrutmen kader, dan penyalur aspirasi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah serta sebagai penjaga integritas dan stabilitas sistem politik nasional. Melalui peran-peran tersebut, partai politik diharapkan mampu menciptakan pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kecenderungan pragmatisme politik, lemahnya demokrasi internal, kurangnya representasi kelompok rentan, serta masih maraknya praktik politik uang dan korupsi di tubuh partai politik. Tantangan-tantangan ini menghambat terwujudnya pemilu yang benar-benar demokratis dan inklusif, di mana seluruh kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan setara.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan kapasitas, kualitas, serta integritas partai politik agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Reformasi internal partai, peningkatan pendidikan politik, penerapan kebijakan afirmatif, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia. Dengan itu, partai politik dapat benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat dan pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

### **Tantangan Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis dan Inklusif**

Partai politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis dan inklusif. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kelembagaan partai politik yang menyebabkan partai sering kali bergantung

pada figur sentral atau elite tertentu. Ketergantungan ini membuat partai rentan terhadap konflik internal dan kesulitan dalam melakukan kaderisasi yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Hasto Kristiyanto, 2023).

Oligarki dalam tubuh partai politik menjadi masalah serius yang menghambat demokratisasi internal. Dominasi elite partai dalam pengambilan keputusan strategis, baik dalam rekrutmen calon legislatif maupun dalam penentuan kebijakan partai, sering kali menutup ruang partisipasi anggota dan kader di tingkat bawah. Hal ini menyebabkan proses politik di internal partai menjadi tidak transparan dan kurang akuntabel. Praktik politik uang, termasuk mahar politik atau “uang perahu”, masih marak terjadi dalam proses pencalonan dan kampanye pemilu. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan rentan terhadap praktik korupsi. Biaya politik yang tinggi membuat partai politik cenderung mencari sumber dana secara ilegal atau melalui patronase, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya pemilu yang bersih dan adil (Li Chen; Rajiv Kumar, 2021).

Kurangnya demokrasi internal dalam partai politik juga tercermin dari proses pemilihan pimpinan partai yang masih didominasi oleh pola patronase dan aklamasi, bukan melalui mekanisme yang terbuka dan demokratis. Hal ini menyebabkan partai gagal menjadi contoh demokrasi terapan dan sering kali tidak mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas. Tantangan berikutnya adalah rendahnya representasi kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya dalam struktur dan pencalonan legislatif partai politik. Meski regulasi telah memberikan akses bagi kelompok ini, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan, sehingga pemilu belum sepenuhnya inklusif (Chen, 2021).

Aksesibilitas informasi dan fasilitas pemilu bagi kelompok rentan juga masih menjadi kendala. Banyak materi kampanye dan informasi pemilu yang tidak tersedia dalam format ramah disabilitas, seperti braille, bahasa isyarat, atau audio description. Selain itu, banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum memenuhi standar aksesibilitas, sehingga membatasi partisipasi kelompok disabilitas secara aktif dalam pemilu (Daphne Joanna Van der Pas; Loes Aaldering, 2020).

Stigma sosial dan budaya terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, masih kuat di masyarakat. Stereotipe negatif dan diskriminasi membuat mereka enggan berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Hal ini diperparah dengan minimnya pendidikan politik yang inklusif, sehingga kelompok rentan kurang memahami hak-hak politik mereka (Larissa Böckmann; Sarah L. de Lange; Nathalie Brack; Matthijs Rooduijn, 2025).

Sistem multipartai di Indonesia juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam membangun koalisi yang stabil dan inklusif. Fragmentasi politik yang

tinggi sering kali menyebabkan negosiasi politik yang pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan jangka pendek, bukan pada penguatan demokrasi substansial dan perlindungan hak kelompok rentan. Regulasi pemilu yang kompleks dan sering berubah menambah beban bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran pemilu membuat proses demokrasi rentan terhadap manipulasi dan pelanggaran etika politik (Williams, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik masih sangat rendah. Banyak partai yang tidak membuka laporan keuangan secara publik, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan dana dan praktik korupsi. Kurangnya transparansi ini juga menghambat upaya pengawasan oleh masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu (Sarah Williams; Michael Tan, 2024).

Tantangan lain adalah rendahnya kualitas pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat. Banyak program pendidikan politik yang bersifat formalitas dan tidak menyentuh substansi demokrasi serta hak-hak politik warga negara. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu sering kali bersifat pasif dan transaksional. Konflik internal partai politik, baik yang bersifat ideologis maupun pragmatis, sering kali berujung pada perpecahan dan pembentukan partai baru (Norm Eisen; Jonathan Katz, 2025). Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas partai, tetapi juga memperburuk citra partai di mata publik dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Minimnya kebijakan afirmatif yang efektif untuk mendorong keterwakilan kelompok rentan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih menjadi masalah. Kuota perempuan, misalnya, sering kali hanya dipenuhi secara administratif tanpa upaya nyata untuk memberdayakan perempuan dalam politik (Eisen, 2025).

Keterbatasan sumber daya dan logistik, terutama di wilayah terpencil dan terluar, juga menjadi tantangan dalam memastikan pemilu yang inklusif. Banyak kelompok masyarakat adat dan masyarakat tanpa identitas kependudukan yang belum dapat menggunakan hak pilihnya secara penuh karena kendala administratif dan teknis (Kristina Čufar; Hana Hawlina, 2025).

Terakhir, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik akibat berbagai praktik negatif di atas menjadi tantangan besar dalam membangun demokrasi yang sehat dan inklusif. Upaya reformasi internal, penguatan regulasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting yang harus diambil agar partai politik benar-benar dapat mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif di Indonesia (Klaukka, 2017).

Dengan demikian, bahwa partai politik di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik dari aspek internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan tersebut meliputi lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, praktik politik uang, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya representasi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas lainnya. Selain itu,

kompleksitas regulasi, fragmentasi politik, serta rendahnya kualitas pendidikan politik dan aksesibilitas juga turut memperburuk situasi.

Kendala-kendala tersebut tidak hanya menghambat terwujudnya pemilu yang benar-benar demokratis dan inklusif, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi yang serius di tubuh partai politik, mulai dari penguatan demokrasi internal, penerapan kebijakan afirmatif yang efektif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga penguatan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara konsisten dan berkesinambungan, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pilar utama demokrasi. Hal ini penting agar pemilu di Indonesia benar-benar menjadi ajang yang demokratis, inklusif, dan mampu mewakili seluruh kepentingan rakyat tanpa diskriminasi, sehingga kualitas demokrasi Indonesia dapat terus meningkat di masa mendatang.

## **Kesimpulan**

Partai politik memegang peranan vital sebagai pilar utama demokrasi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif di Indonesia. Fungsi utama partai politik meliputi pendidikan politik, rekrutmen kader, penyaluran aspirasi, dan pengawasan terhadap jalannya pemilu, yang semuanya bertujuan untuk memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi dan memiliki kesempatan yang setara dalam proses politik. Melalui mekanisme internal yang demokratis dan keterbukaan akses, partai politik diharapkan mampu menjadi penghubung efektif antara rakyat dan pemerintah serta menjamin representasi kelompok rentan dalam pemilu.

Namun, dalam praktiknya, partai politik masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek internal maupun eksternal. Tantangan tersebut meliputi lemahnya demokrasi internal, dominasi elite, praktik politik uang, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya representasi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas lainnya. Selain itu, kompleksitas regulasi, fragmentasi politik, dan rendahnya kualitas pendidikan politik juga turut memperburuk situasi, sehingga proses pemilu belum sepenuhnya demokratis dan inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi yang serius di tubuh partai politik, mulai dari penguatan demokrasi internal, penerapan kebijakan afirmatif yang efektif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga penguatan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara konsisten, partai politik dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pilar

utama demokrasi, sehingga pemilu di Indonesia benar-benar demokratis, inklusif, dan mampu mewakili seluruh kepentingan rakyat tanpa diskriminasi.

## References

- APSA Presidential Task Force. (2023). More Than Red and Blue: Political Parties and American Democracy. *APSA Presidential Task Force on Political Parties*. <https://protectdemocracy.org/wp-content/uploads/2023/07/APSA-PD-Political-Parties-Report-FINAL.pdf>
- Aqilla Zati; Maharani Awalia; Romero Heriarji; Ziyad Nabil. (2025). Menuju Keberlanjutan Politik yang Inklusif dan Partisipatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/53154/19833/155404>
- Aslan, A. (2019). MAKNA DAN HAKIKAT PENDIDIKAN BIDANG POLITIK DALAM ALQURAN. *Cross-Border*, 2(2), 101–109.
- Booth, A. (2020). Clear and present questions: Formulating questions for evidence based practice. *Library Hi Tech*, 38(1), 28–39. <https://doi.org/10.1108/LHT-09-2019-0182>
- Chen, L. K., Rajiv. (2021). Inclusive Electoral Systems and Minority Representation: A Comparative Analysis. *Electoral Studies*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134567890>
- Cici Maruci. (2025). The 2025 Regional Head Elections (Pilkada) Phenomenon: Preparation, Candidates, and Political Dynamics in the Election. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/44832/pdf>
- Daphne Joanna Van der Pas; Loes Aaldering. (2020). Gender Differences in Political Media Coverage: A Meta-Analysis. *Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz046>
- Dean Schafer; Seraphine F. Maerz; Carsten Q. Schneider; Alexandra Krasnokutskaya. (2025). “Strongmen” Don’t Redistribute: Illiberal Leaders on the Right and Worsening Economic Inequality. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>
- Eisen, N. K., Jonathan. (2025). Democracy Playbook 2025: Ten Commitments for Advancing Democracy. *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/articles/democracy-playbook-2025/>
- Gary Klaukka; Sam Van der Staak; Jorge Valladares. (2017). The changing nature of political parties and representation. *International IDEA*. <https://www.idea.int/gsod-2017/files/IDEA-GSOD-2017-CHAPTER-4-EN.pdf>
- Hasto Kristiyanto. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Hugo Bonin. (2025). Liberal Democracy From Oxymoron to Celebrated Concept: British and French Discourses of 1968–2001. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>
- Jehad Yousif Alayasa; Juraj Nemeč. (2025). Rebuilding Countries in a War and Post-War Context: Reconstruction Models and Their Impacts. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>

- John Smith; Maria Lee. (2022). Political Parties and Electoral Competition: Challenges for Democratic Consolidation. *Journal of Political Science*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123456789>
- Klaukka, G. V. der S., Sam; Valladares, Jorge. (2017). The changing nature of political parties and representation. *International IDEA*. <https://www.idea.int/gsod-2017/files/IDEA-GSOD-2017-CHAPTER-4-EN.pdf>
- Kristina Čufar; Hana Hawlina. (2025). Weaponizing Culture: The Role of Illiberal Cultural Policy in Slovenia's Democratic Backsliding. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>
- Kristiyanto, H. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Larissa Böckmann; Sarah L. de Lange; Nathalie Brack; Matthijs Rooduijn. (2025). Far-Right Illiberalism in the European Parliament. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>
- Li Chen; Rajiv Kumar. (2021). Inclusive Electoral Systems and Minority Representation: A Comparative Analysis. *Electoral Studies*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134567890>
- Marta Pérez-Escobar; Noemí Morejón-Llamas; Purificación Alcaide-Pulido. (2025). Populist Rhetoric and Hate Speech: Analyzing Xenophobic Narratives in Vox's 2023 Election Campaign. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>
- Maruci, C. (2025). The 2025 Regional Head Elections (Pilkada) Phenomenon: Preparation, Candidates, and Political Dynamics in the Election. *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/44832/pdf>
- Melek Aylin Özoflu; Giray Gerim. (2025). Legitimizing Illiberalism: The Construction of Civilizational Identity by the Justice and Development Party in Türkiye. *Politics and Governance*. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance>
- Minh Nguyen; Dewi Sari. (2023). Party System Institutionalization and Democratic Quality in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85156789012>
- Nguyen, M. S., Dewi. (2023). Party System Institutionalization and Democratic Quality in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85156789012>
- Norm Eisen; Jonathan Katz. (2025). Democracy Playbook 2025: Ten Commitments for Advancing Democracy. *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/articles/democracy-playbook-2025/>
- Pascal D. König; Georg Wenzelburger. (2020). Opportunity for renewal or disruptive force? How artificial intelligence alters democratic politics. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101389>
- Sarah Williams; Michael Tan. (2024). Digital Media and Political Participation in Democratic Elections. *Information, Communication & Society*. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85145678901>

- Smith, J. L., Maria. (2022). Political Parties and Electoral Competition: Challenges for Democratic Consolidation. *Journal of Political Science*.  
<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123456789>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 209–222.
- Williams, S. T., Michael. (2024). Digital Media and Political Participation in Democratic Elections. *Information, Communication & Society*.  
<https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85145678901>
- Zati, A. A., Maharani; Heriarji, Romero; Nabil, Ziyad. (2025). Menuju Keberlanjutan Politik yang Inklusif dan Partisipatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.  
<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/53154/19833/15540>
- 4